

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah merupakan satu sistem yang lepas dari pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam paranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.¹

Usaha pemerintah yang sangat penting dan mendasar yaitu upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945, yaitu mengupayakan terlaksananya secara sungguh-sungguh satu sistem pendidikan nasional. Pasal 31 ayat (3) menegaskan:

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.²

Madrasah dalam dekade terakhir abad XX ini merupakan lembaga pendidikan bagi orang tua untuk menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan bagi putra-putrinya.³ Bahkan beberapa daerah tertentu jumlah madrasah meningkat cukup tajam dari tahun ke tahun. Bila dilihat dari awal pertumbuhannya madrasah dimotivasi oleh keadaan dan situasi tertentu yang mengkondisikan madrasah itu tumbuh dengan dimotori oleh perseorangan atau lembaga swasta tertentu.

¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 77

² T. Agustin (ed.), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke-4*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2002) hlm. 29.

³ Abudin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 187-188.

“Madrasah yang semula dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan, sekarang ini disatu sisi mengalami pengayaan peran dan fungsi. Madrasah boleh mengklaim sebagai “*sekolah umum plus*”, sementara di sisi lain, karena tuntutan untuk memperkaya peran dan fungsinya madrasah mendapat beban tambahan yang cukup berat karena di samping harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, madrasah juga harus memberikan materi-materi esensial keislamannya yang selama ini diajarkan”.⁴

Untuk itu salah satu tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah tanggungjawab pendanaan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang SISDIKNAS, Pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan masyarakat”.⁵ Lebih lanjut lagi disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 bahwa:

”Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)”.

Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban besar mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari APBN. Salah satu kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu tahun 2001-2009 adalah peningkatan akses bagi anak usia 7-15 tahun terhadap pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.⁶ Sementara itu kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) ternyata menurunkan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak dari penduduk miskin, lebih lanjut akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Selanjutnya mulai periode Juli 2005, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat melakukan perubahan dalam rangka perbaikan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-

⁴ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 71.

⁵ Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 99.

⁶ Depdiknas dan Depag, *Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku*, (Jakarta: 2006), hlm. 71.

BBM).⁷ Maka mulai periode ini pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan dengan nama Bantuan Operasional Sekolah (BOS). dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun dan berkualitas tinggi.

BOS adalah sebuah program pemerintah untuk meringankan biaya operasional sekolah yang berasal dari PKPS-BBM. Yang dimaksud dalam PKPS-BBM bidang pendidikan ialah program bantuan biaya pendidikan mencakup komponen biaya operasional non personil dan tidak mencakup biaya personil dan biaya investasi bagi SD/SDLB/MI/salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SD serta SMP/SMPLB/MTs/salafiyah.⁸

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi, efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan dan transparansi pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu sumber daya yang perlu di kelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan/pembiayaan.

Dalam konteks ini, pembiayaan/keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran dilembaga pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan dan pelaksanaan program supervisi. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah harus mengetahui dan mampu mengelola

⁷ Depdiknas dan Depag, *Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku*, hlm 3-4

⁸ Depdiknas dan Depag, *Petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan*, (Jakarta, 2005), hlm. 1.

keuangan sekolah dengan baik, bertanggungjawab dan transparan kepada masyarakat serta pemerintah.⁹

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi untuk meneliti materi-materi yang ada dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi fokus perhatian dari penelitian ini. Ada pun rumusan masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjungsari Tersono Batang...?
2. Bagaimana mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjungsari dengan adanya program BOS (Bantuan Operasional Sekolah)...?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka menjadi jelas bahwa penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjungsari.
2. Untuk mengetahui hasil mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjungsari dengan adanya program BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Setelah melakukan penelitian yang sesuai dengan prosedur penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a) Mengetahui proses pembiayaan pendidikan di MIS Tanjungsari mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pembiayaan.

⁹ Sukistrtyiorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 129-130

- b) Mengetahui proses pendistribusian dana BOS dan pemanfaatannya dan kendala-kendala serta pengalokasian dana BOS di MIS Tanjungsari Tersono Batang.
 - c) Mengetahui mekanisme pemanfaatan dana BOS yang dicanangkan pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan.
 - d) Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai pembanding dalam penelitian-penelitian lebih lanjut, serta memberikan input dalam pengembangan manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam.
2. Bagi Obyek Penelitian
- a) Bagi MIS Tanjungsari studi ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan, bahan dokumentasi historis dan bahan pertimbangan untuk megambil langkah-langkah peningkatkan mutu pendidikan.
 - b) Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjungsari Tersono Batang.